



Minggu, 25 November 2023

Siaran Pers

Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III, Lt. 6 Jl. Jend.
Gatot Subroto Jakarta 10270
Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

Instagram:
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Hadiri Sidang Parlemen Asia-Pasifik, DPR RI Dorong Kerjasama Keamanan Maritim

Manila - Filipina, Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Rimendorongparlemen negara-negara Asia-Pasifik untuk memperkuat kerjasama keamananmaritim. Usulan tersebut disampaikan dalam Sidang Umum Parlemen Negara-negara Asia Pasifik atau Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-31 di Manila, Filipina, pada 23-26 November 2023. Sidang tahunan APPF kali ini dihadiri oleh 19 negara anggota APPF yang mencakup negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika Latin dan Amerika Utara, serta Oseania.

Delegasi DPR RI berinisiatif mengajukan resolusi berjudul "*Enhancing Maritime Security Cooperation in Asia-Pacific*". Melalui resolusi tersebut, DPR RI mengajak seluruh parlemen negara-negara Asia-Pasifik untuk memperkuat kerjasama keamanan maritim. Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana dan Achmad Hafisz Tohir yang memimpin delegasi tersebut menekankan peran penting kawasan Asia-Pasifik di masa depan.

Perairan Asia-Pasifik merupakan salah satu kawasan tersibuk di dunia dan merupakan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Asia dengan Asia Timur serta Asia dan Oseania. Selain itu, perairan Pasifik juga mengandung kekayaan alam sumber daya kelautan yang melimpah termasuk cadangan minyak bumi, gas alam, energi, dan perikanan yang bisa menopang perekonomian negara-negara Asia-Pasifik dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Kendati demikian, sejumlah tantangan harus dihadapi oleh negara-negara Asia Pasifik jika ingin memelihara keamanan dan stabilitas kawasan. Diantaranya adalah Kejahatan Transnasional, Gejolak Geopolitik, Situasi Kemanusiaan di Myanmar, serta Perubahan Iklim. Selain itu, kawasan ini juga dihadapkan pada ketidakpastian situasi keamanan di Semenanjung Korea.

Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, negara-negara Asia Pasifik diharapkan mampu menyatukan visi demi mengatasi berbagai tantangan tersebut, serta mewujudkan stabilitas sebagai pra-syarat pembangunan. Resolusi usulan Indonesia merupakan wujud komitmen parlemen untuk terus turut menyuarakan penyelesaian konflik dan demilitarisasi di Laut China Selatan, serta penanggulangan berbagai gangguan kewananaan termasuk illegal *fishing*.

Usulan Indonesia disambut baik oleh peserta Sidang APPF yang akhirnya digabungkan dengan usulan resolusi dari Chile, Russia, Jepang, Meksiko, dan Filipina yang memiliki konsen serupa dalam mendorong peran parlemen dalam menciptakan keamanan dan stabilitas kawasan.

Pada Sidang Pleno Ekonomi dan Perdagangan, Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafisz Tohir menyoroti pentingnya kerjasama bidang infrastruktur kawasan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kerjasama Negara-negara Asia Pasifik bisa difokuskan pada tiga area yaitu peningkatan investasi, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas SDM. Politisi Partai Amanat Nasional tersebut menyoroti persoalan investasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang tidak dibarengi oleh transfer teknologi sehingga masih mengandalkan tenaga kerja asing. Hal tersebut berlaku di berbagai sektor.

Sementara itu, terkait kerjasama perubahan iklim, Anggota BKSAP dari Fraksi PDIP yaitu Hugua, menyuarakan perlunya upaya untuk memperluas cakupan Green Climate Funds atau pendanaan perubahan iklim. Negara-negara maju yang menghasilkan emisi lebih besar diharapkan mampu memberikan bantuan pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang yang tentunya harus diikuti dengan insentif dan penegakkan hukum. Anggota Komisi II tersebut mencontohkan Indonesia yang telah memberikan insentif pajak bagi upaya-upaya adaptasi perubahan iklim.

Masih dalam rangkaian Sidang APPF, Delegasi DPR RI juga berpartisipasi aktif kerjasama bidang pendidikan dan kesehatan. Putu Supadma Rudana berharap agar kerjasama pendidikan, budaya dan pariwisata di antara negara-negara Asia-Pasifik diarahkan tidak semata-mata untuk mendulang keuntungan ekonomi tapi juga sebagai upaya yang sejalan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Politisi Partai Demokrat itu juga menekankan bahwa kerjasama pendidikan dan kebudayaan bisa menjadi cara baru untuk mempertahankan stabilitas kawasan. Secara konkret, Putu mengajak parlemen negara-negara APPF untuk memperluas jaringan melalui sister city antar kota budaya, kota pendidikan, dan kota pariwisata di Asia-Pasifik.

Terkait isu kesehatan, Sidang APPF juga membahas kemajuan Universal Health Coverage (UHC) di negara-negara Asia Pasifik. Anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Putri Anetta Komaruddin memaparkan kemajuan program UCH di Indonesia yang sudah mencapai angka lebih dari 95%. Itu menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberikan jaminan kesehatan. Dalam sesi tersebut, Putri mengajak parlemen anggota APPF untuk terus menjalin kerjasama regional demi memperkuat resiliensi atau ketahanan sistem kesehatan.

Materi Sidang APPF kali ini mencakup beberapa isu yang dibahas di lima sesi. Selain isu Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Perdagangan, serta Pendidikan dan Kesehatan, Sidang APPF yang ke-31 ini juga membahas isu jender, digitalisasi dan kepemudaan. Rangkaian Sidang APPF diakhiri dengan penandatanganan *Joint Communiqué* oleh seluruh ketua delegasi negara-negara yang hadir.

Pada kesempatan tersebut, Delegasi DPR RI dipimpin oleh Putu Supadma Rudana selaku Wakil Ketua BKSAP dan didampingi oleh Hafisz Thohir selaku Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Sementara itu, turut hadir pula anggota Delegasi yaitu Hugua dan Vanda Sarundajang dari Fraksi PDI-P, Himmatul Aliyah dari Fraksi Gerindra, Putri Anetta Komarudin dari Fraksi Partai Golkar, Syahrul Aidi Maazat dari Fraksi PKS, Arzetti Bilbina dari Fraksi PKB, serta Emma Umiyatul Chusnah dari Fraksi PPP.

Selain mengikuti Sidang APPF, Delegasi DPR RI juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan parlemen Papua New Guinea (PNG), Federasi Mikronesia, dan Malaysia. Sejumlah isu mulai dari penguatan kerjasama perdagangan, perbatasan, serta agenda pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) juga turut menjadi bahasan pertemuan bilateral.

(*****)